

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN 2023**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SERANG
TAHUN 2022**

JL. JEND. SUDIRMAN No.5 CICERI
KOTA SERANG – PROV. BANTEN
TELP/FAX : (0254) 8243012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS	
TAHUN 2019	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Opd	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnakertrans Kota Serang	26
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disnakertrans Kota Serang	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	41
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Disnakertrans	44
3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	64
4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah	64
4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak	65
4.3 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja K/L dan Renja PD Provinsi	67
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	69
LAMPIRAN	

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dibentuk pada Tanggal 4 Pebruari 2011 berdasarkan Peraturan Walikota Serang No. 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Serang. Peraturan Walikota Serang 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga dan Transmigrasi dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Seiring dengan diberlakukannya Undang– undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara Sistematis, Terarah, Terpadu, menyeluruh tanggap terhadap Perubahan Ayat 2 Pasal 2 dengan jenjang Perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten/ Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan RKPD sesuai dengan pasal 7 Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki RENJA OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan mengacu kepada RKPD memuat kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi Masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Rencana Kerja Disnakertrans mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan

Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan Dokumen yang secara substansial dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Serang serta Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA);
2. Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada Tahun 2023.

Mengingat arti Strategis Dokumen RENJA OPD dalam mendukung Penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal Tahapan Penyusunan hingga penetapan Dokumen RENJA OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Disnakertrans Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor)
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7)
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016)
16. Peraturan Walikota Serang No.116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja 2023 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun 2021 dan Perencanaan Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan Program/ Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi dan Tujuan Sasaran RENJA OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tentang Rencana perkiraan Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2023, Rencana Program Unggulan dan Mendesak, Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja K/L dan Renja PD Provinsi Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atas RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2023, Catatan Penting, Kaidah- kaidah Pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS TAHUN 2021
DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan. Alokasi Anggaran dalam APBD Murni Tahun 2021 Rp. 7.886.528.765,- sedang dalam APBD Pergeseran 6 Tahun 2021 Rp. 7.8513.608.419,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 4.411.172.278,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.367.436.141,- dan Belanja Modal Rp. 73.000.000,-

Dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2021 Alokasi Anggaran dalam APBD Pergeseran 6 Tahun 2021 turun Rp. 34.920.346,- dengan perincian : Belanja Pegawai turun Rp. 53.650.346,- Belanja Barang dan Jasa turun Rp. 29.270.000,- dan Belanja Modal tetap.

Penurunan besaran anggaran pada APBD Pergeseran 6 Tahun 2021 sebesar Rp. 34.920.346,- dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp. 5.682.853.831,- menjadi Rp. 5.647.933.485,- turun Rp. 34.920.346,- karena adanya efisiensi digunakan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp.5.647.933.485,- Realisasi Rp.5.543.1840.743,- atau 98,15% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp.176.159.750,- Realisasi Rp.174.486.500,- atau 99,05% dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.4.376.482.778,- Realisasi Rp.4.309.200.577,- atau 98,46% dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.38.200.000,- Realisasi Rp.38.200.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.27.010.000,- Realisasi Rp.27.010.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.462.278.992,- Realisasi Rp.449.968.714,- atau 97,34% dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.119.380.000,- Realisasi Rp.103.785.487,- atau 86,94% dengan Sub Kegiatan.
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.448.421.965,- Realisasi Rp.440.533.465,- atau 98,24% dengan Sub Kegiatan
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp.832.031.500,- Realisasi Rp.828.081.500,- atau 99,53% dengan kegiatan :

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi dengan pagu anggaran Rp.586.995.500,- Realisasi Rp.586.995.500,- atau 100% dengan Sub Kegiatan
 - a) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan pagu anggaran Rp.92.920.000,- Realisasi Rp.90.970.000,- atau 97,90% dengan Sub Kegiatan
 - a) Proses Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil dengan pagu anggaran Rp.60.370.000,- Realisasi Rp.60.370.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.91.746.000,- Realisasi Rp.89.746.000,- atau 97,82% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp.751.383.434,- Realisasi Rp.729.108.867,- atau 97,04% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.436.947.641,- Realisasi Rp.427.247.000,- atau 97,78% dengan Sub Kegiatan
 - a) Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
 - b) Pelayanan Antar Kerja
 - c) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - d) Perluasan Kesempatan Kerja
2. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.26.136.000,- Realisasi Rp.23.886.000,- atau 91,39% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pengawasan dan pengendalian LPTKS
3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan pagu anggaran Rp.131.000.000,- Realisasi Rp.122.156.250,- atau 93,25% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Informasi Pasar Kerja Online
4. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota dengan pagu anggaran Rp.157.299.793,- Realisasi Rp.155.819.617,- atau 99,06% dengan Sub Kegiatan
 - a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)

4. Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp.314.099.250,- Realisasi Rp.307.496.250,- atau 97,90% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran Rp.196.420.000,- Realisasi Rp.193.735.000,- atau 98,63% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - b) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran Rp.117.679.250,- Realisasi Rp.113.761.250,- atau 96,67% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
 - b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
 - c) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp.159.985.750,- Realisasi Rp.157.705.750,- atau 98,57% dengan kegiatan :

1. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp.159.985.750,- Realisasi Rp.157.705.750,- atau 98,57% dengan Sub Kegiatan
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b) Penyuluhan transmigrasi

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp.146.175.000,- Realisasi Rp.139.585.000,- atau 95,49% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dengan pagu anggaran Rp.146.175.000,- Realisasi Rp.139.585.000,- atau 95,49% dengan Sub Kegiatan
 - a) Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman

2.1.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

Perkiraan capaian Rencana Kerja Tahun berjalan (Tahun n-1) 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang melaksanakan 6 (Enam) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2021 Rp. 7.622.150.648,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.572.150.648,-(Belanja Pegawai Rp. 5.173.604.776,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.398.545.872,-) dan Belanja Modal Rp. 50.000.000,-

Adapun prakiraan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 6.404.304.914,- dengan kegiatan :

8. Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp. 194.032.750,- dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 5.155.682.276,- dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 53.000.000,- dengan Sub Kegiatan:
- a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 19.010.000,- dengan Sub Kegiatan
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 322.730.713,- dengan Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 214.951.200,- dengan Sub Kegiatan.
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 444.897.975,- dengan Sub Kegiatan
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp. 559.772.750,- dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi dengan pagu anggaran Rp. 559.772.750,- dengan Sub Kegiatan
 - a) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran 286.826.984,- dengan kegiatan :**
 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 171.826.984,- dengan Sub Kegiatan
 - a) Pelayanan Antar Kerja
 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan pagu anggaran Rp. 115.000.000,- dengan Sub Kegiatan
 - a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Informasi Pasar Kerja Online

- 4. Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp. 172.096.000,- dengan kegiatan :**
 1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran Rp. 67.346.000,- dengan Sub Kegiatan
 - c) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran Rp 104.750.000,- dengan Sub Kegiatan
 - d) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota

- 5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp 149.150.000,- dengan kegiatan :**

2. Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dengan pagu anggaran Rp. 149.150.000,- dengan Sub Kegiatan
 - a) Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2021

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :

1. Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasilnya Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 40.200.000,- realisasi Rp. 24.825.487,- (61,75%) ,target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan, (100%.)

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang di Rencanakan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp.5.647.933.485,- Realisasi Rp.5.543.1840.743,- atau 98,15% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp.176.159.750,- Realisasi Rp.174.486.500,- atau 99,05% dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.4.376.482.778,- Realisasi Rp.4.309.200.577,- atau 98,46% dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.38.200.000,- Realisasi Rp.38.200.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.27.010.000,- Realisasi Rp.27.010.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.462.278.992,- Realisasi Rp.449.968.714,- atau 97,34% dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.119.380.000,- Realisasi Rp.103.785.487,- atau 86,94% dengan Sub Kegiatan.
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.448.421.965,- Realisasi Rp.440.533.465,- atau 98,24% dengan Sub Kegiatan
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp.832.031.500,- Realisasi Rp.828.081.500,- atau 99,53% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi dengan pagu anggaran Rp.586.995.500,- Realisasi Rp.586.995.500,- atau 100% dengan Sub Kegiatan
 - a) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan pagu anggaran Rp.92.920.000,- Realisasi Rp.90.970.000,- atau 97,90% dengan Sub Kegiatan
 - a) Proses Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil dengan pagu anggaran Rp.60.370.000,- Realisasi Rp.60.370.000,- atau 100% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.91.746.000,- Realisasi Rp.89.746.000,- atau 97,82% dengan Sub Kegiatan
 - a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp.751.383.434,- Realisasi Rp.729.108.867,- atau 97,04% dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.436.947.641,- Realisasi Rp.427.247.000,- atau 97,78% dengan Sub Kegiatan

- a) Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
 - b) Pelayanan Antar Kerja
 - c) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - d) Perluasan Kesempatan Kerja
2. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.26.136.000,- Realisasi Rp.23.886.000,- atau 91,39% dengan Sub Kegiatan
- a) Pengawasan dan pengendalian LPTKS
3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan pagu anggaran Rp.131.000.000,- Realisasi Rp.122.156.250,- atau 93,25% dengan Sub Kegiatan
- a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Informasi Pasar Kerja Online
4. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota dengan pagu anggaran Rp.157.299.793,- Realisasi Rp.155.819.617,- atau 99,06% dengan Sub Kegiatan
- a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)

4. Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp.314.099.250,- Realisasi Rp.307.496.250,- atau 97,90% dengan kegiatan :

- 1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran Rp.196.420.000,- Realisasi Rp.193.735.000,- atau 98,63% dengan Sub Kegiatan
 - d) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - e) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran Rp.117.679.250,- Realisasi Rp.113.761.250,- atau 96,67% dengan Sub Kegiatan

- e) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
- f) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
- g) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp.159.985.750,- Realisasi Rp.157.705.750,- atau 98,57% dengan kegiatan :

- 1. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp.159.985.750,- Realisasi Rp.157.705.750,- atau 98,57% dengan Sub Kegiatan
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - d) Penyuluhan transmigrasi

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp.146.175.000,- Realisasi Rp.139.585.000,- atau 95,49% dengan kegiatan :

- 1. Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dengan pagu anggaran Rp.146.175.000,- Realisasi Rp.139.585.000,- atau 95,49% dengan Sub Kegiatan
 - a) Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

2.1.5 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja, hasil atau Keluaran yang di rencanakan adalah tidak sampai melebihi Target karena di sesuaikan dengan kebutuhan.

2.1.6 Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan adalah: Kurang tepatnya suatu Perencanaan , kurang koordinasi PPTK
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah sesuai dengan kebutuhan
3. Adanya Efisiensi

2.1.7 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra OPD :

- a. Dirasakan oleh Masyarakat Pencari kerja dan Pelatihan keterampilan
- b. Masyarakat Pekerja memiliki ketenangan dalam bekerja dan berusaha
- c. Mengurangi Angka Pengangguran
- d. Merubah pola hidup miskin menjadi ada harapan untuk hidup lebih baik

2.1.8 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

yaitu untuk penganggaran kegiatan secara optimal anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

TABEL 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Serang**

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023	REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2022) (%)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (2022)					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan (2022) (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)				
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	9,26	9,16	9,16	100	9,06	9,06	101,12				
		Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
		Persentase Kesempatan Kerja	%	91,45	90,75	90,95	90,95	100	91,05	91,05	99,56				
		Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00				
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	70	65	66	66	100	68	68	97,14	
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan keterampilan	org	330	120	45	45	100	75	240	72,73
					Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	org	119	23	16	16	100	32	71	59,66	
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah dok FS dan DED(master plan)Perencanaan Pembangunan BLK Kota Serang	dok					2	2		
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase LPK yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPK yang dibina	org	135	25	35	35	100	35	95	70,37
					Jumlah pengelola LPK yang dibina	LPK	102	27	25	25	100	25	77	75,49	
					jumlah peserta Bimtek tatacara penyusunan kurikulum/silabus	LPK	100					40	40	40,00	

2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	persentase perusahaan kecil yang telah dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina	perush	315	75	40	40	100	100	215			68,25
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktivitas pada perusahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bintek/pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja	org	240	70	70	70	100	50	190			79,17
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	%	7,52	7,35	7,5	7,5	100	7,5	7,5			99,73
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan antar kerja	%	5,25		5,25	5,25	100	5,25	5,25			100,00
2	07	04	2.01	01	Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bintek petugas pelayanan antar kerja	org	160		80	80	100	40	120			75,00
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bintek calon tenaga kerja	org	828	90	288	288	100	200	578			69,81
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	org	320					150	150			46,88
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan (kewirausahaan)	org	310	130	40	40	100	70	240			77,42
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai fungsi	%	100		100	100	100	100	100			100,00
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Koordinasi dan pembinaan kepada LPTKS (BKK, P3MI, dan LPTKS lainnya)	org	175	45	30	30	100	50	125			71,43
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase dokumen informasi pasar kerja	%	100		100	100	100	100	100			100,00
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja	Jumlah aplikasi yang terpelihara	aplikasi	2					1	1			50,00
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Dokumen data dan Informasi pasar kerja (IPK)	dok	5	2	1	1		1	4			80,00
2	07	04	2.03	03	Jobfair/Bursa Kerja	Kegiatan Job Fair	keg	1	1					1			100,00
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	Persentase PMI yang dilindungi	%	55,5		55,5	55,5	100	55,5	55,5			100,00
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta workshop calon pekerja migran Indonesia (PMI)	org	250	110	40	40	100	50	200			80,00

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	%	50	35	40	40	100	45	45	90,00
2	07	05	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	%	100		100	100	100	100	100	100,00
2	07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta Bimtek persyaratan kerja (E-PP dan PKB)	org	185		90	90	100	45	135	72,97
2	07	05	2	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dokumen Movev pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan Data Sinergitas Ketenagakerjaan	dok	9	4	1	1	100	2	7	77,78
						Jumlah Peserta bimtek Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	perush	202	82	40	40	100	40	162	80,20
						Jumlah peserta rapat persiapan penetapan UMK Kota Serang	org	113	42	21	21	100	25	88	77,88
2	07	05	2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	100		100	100	100	100	100	100,00
2	07	05	2	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jml peserta kegiatan hari buruh internasional	org	100					50	50	50,00
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen Rekomendasi LKS Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	dok	2					1	1	50,00
						Jumlah bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial	org	275	75				100	175	63,64
2	07	05	2	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Kesepakatan bersama LKS Tripartit, DEPEKO dan Gugus Tugas EEO dalam membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Serang dan meningkatnya SDM	dok	9		3	3	100	3	6	66,67

						Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	9,26	9,16	9,16	100	9,06	9,06	101,12
						Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	90,7	90	90,7	90,7	100	90,7	90,7	100,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%	30	0	30	30	100	30	30	100,00
3	32	03	2.01		Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	30	27,7	30	30	100	30	30	100,00
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen Kerjasama Antar Daerah	Dok	7	1	2	2	100	2	5	71,43
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Lokasi Penempatan	lokasi	4					2	2	50,00
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Peserta sosialisasi/seleksi tentang program transmigrasi regional	org	390	110	60	60	100	100	270	69,23
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran	KK	50	25				10	35	70,00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Dibina	%	75	43	75	75	100	75	75	100,00
3	32	04	2.01		Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang dibina	%		100	100	100	100	100	100	#DIV/0!
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah KK transmigran yang dibina di lokasi penempatan	KK	80	25	15	15	100	20	60	75,00
						Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	Nilai	66,34	66,28	66,30	66,30	100	66,32	66,32	99,97
						CAPAIAN HASIL EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH	Nilai	53,55		53,47	53,47	100	53,50	53,50	99,91
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	76	14	16	16	100	16	46	60,53
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan dan Dokumen perubahan Renstra, PK dan IKU	Dok	21	6	5	5	100	5	16	76,19
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Dok	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Dok	5	2	1	1	100	1	4	80,00

2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA	Dok	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Dok	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD,	Dok	12	6	2	2	100	2	10	83,33
						Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	Dok	20	8	4	4	100	4	16	80,00
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan profil PD	dok	2					1	1	50,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	5	10	3	3	100	3	3	60,00
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	14	8	2	2	100	2	12	85,71
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	Dok	5	1	1	1	100	1	3	60,00
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD	dok	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas harian	stel	82		26	26	100	28	54	65,85
						Jumlah Pakaian batik tradisional	stel	56					28	28	50,00
						jumlah pakaian seragam khusus pelayanan	stel	56					28	28	50,00
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi		56					28	28	50,00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	56	24	12	12	100	10	46	82,14
						Jumlah Unit (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	unit	91	53	8	8	100	15	76	83,52
2	07	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00

2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan mamin kunjungan tamu	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan (perjalanan dinas)	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	8					4	4	50,00
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan	unit	2						0	0,00
2	07	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Unit meubeler	unit	22	2				10	12	54,55
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kantor	bulan	48	24	12	12	100	12	48	100,00
2	07					Jumlah event	event	12	3	3	3	100	3	9	75,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	unit	24	21	21	21	100	21	21	87,50
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Yang Dipelihara	unit	305	53	69	69	100	69	191	62,62
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit mebel Yang Dipelihara	unit	6						0	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang pada Tahun 2021 pelaksanaan kinerja pelayanan OPD adalah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan RPJMD

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DISNAKERTRANS

Kota Serang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun			2,8	2,7	5,3	4,2	3,1	6,45	4,89	2,17	4,2	3,1	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			100	100	60,5	60	50,8	83,33	24,24	100	60	50,8	
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			8,82	7,35	7,5	7,52	7,52	8,82	7,35	7,99	7,52	7,52	
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek			100	100	60	70	89,5	33,61	86,55	66,78	70	89,5	
5	Sasaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			100	100	100	100	100	92	0	100	100	100	
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			100	100	100	100	100	75	50,85	100	100	100	
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka			8,08	9,26	9,16	9,06	8,96	8,08	9,26	9,41	9,06	8,96	
9	Persentase Pencari Kerja yang Telah Berdaya			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Kesempatan Kerja			91,92	90,75	90,95	91,05	91,45	91,92	90,75	90,74	91,05	91,45	
11	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			61,45	65	66	68	70	61,45	65	40,98	68	70	
13	Capaian Pencari kerja yang ditempatkan			8,82	7,32	7,5	7,65	7,75	8,82	7,32	7,99	7,65	7,75	
14	Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan			30	35	40	45	50	30	35	36,35	45	50	
15	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran			90	90	90,7	90,7	90,7	90	90	80	90,7	90,7	
16	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan			17,24	0	30	30	30	17,24	0	0	30	30	
17	Capaian Transmigran Yang Dibina			57	43	75	75	75	57	43	66,67	75	75	
18	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah			66,26	66,28	66,30	66,32	66,34	66,26	66,28	60,36	66,32	66,34	

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISNAKERTRANS KOTA SERANG

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2020 cukup baik dengan capaian rata-rata di atas 90%

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD :

1. Permasalahan yang di hadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
 - b. Belum Optimalnya Kualitas dan Produktivitas Pelatihan dan Keterampilan
 - c. Perusahaan belum sepenuhnya menjalankan Peraturan Ketenagakerjaan
 - d. Kurangnya Sosialisasi Ketransmigrasian
 - e. Kurangnya pengetahuan Masyarakat akan manfaat bertransmigrasi
2. Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD:
 - a. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan Perusahaan- Perusahaan
 - c. Belum tersedianya sarana transportasi yang dapat menjangkau desa-desa wilayah Transmigrasi.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional / Internasional , seperti NSPK, SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) :

Pencapaian Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, sebagai penjabaran dari Visi dan misi Kepala Daerah Kota Serang terhadap capaian Program Nasional / Internasional seperti SPM dan MDGs adalah Program Kegiatan Pelatihan kewirausahaan, Pelatihan berbasis kompetensi dan Pelatihan berbasis kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh Masyarakat Pencari kerja dan Masyarakat Industri di Kota Serang.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Meningkatkan Pelayanan OPD

Keberhasilan Pembangunan merupakan sasaran Prioritas atau Target Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan Pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal meliputi :
 - a. Kekuatan (*Strenght*)
 - 1) Tekad dan semangat seluruh komponen Masyarakat untuk membangun Kota Serang.
 - 2) Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
 - 3) Sumber Daya Manusia yang memadai di Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
 - 4) Adanya komitmen Pimpinan beserta seluruh Pegawai untuk meningkatkan Pelayanan Prima
 - b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum meningkatnya Profesionalisme Aparatur dan masih rendahnya Produktivitas dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.
- 2) Belum optimalnya Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- 3) Belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dalam Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- 4) Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan

2. Lingkungan Eksternal meliputi :

a. Peluang (*opportunities*)

- 1) Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung pengurangan Angka Pengangguran dan Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja.
- 2) Adanya keinginan kuat dari Masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- 3) Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru, upaya Penempatan Tenaga Kerja melalui Bursa kerja

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Tingginya Angkatan Kerja yang mencari pekerjaan, sehingga tingginya Angka Pengangguran
- 2) Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja yang masih rendah, baik sektor formal maupun sektor informal
- 3) Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menerapkan norma kerja, yakni lemahnya kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan.

2.3.5 Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan mengintegrasikan faktor – faktor Internal dan Eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1.Strategi mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang (SO) adalah:

- a. Mengoptimalkan tekad dan semangat sesuai dengan regulasi untuk mengatur masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dalam Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mengutamakan kepentingan Masyarakat secara luas.

2.Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah :

- a. Mengoptimalkan tekad dan semangat Masyarakat Kota Serang serta sumber daya manusia dalam Bidang Ketenagakerjaan untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.
- b. Mengoptimalkan pendataan tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- c. Mengoptimalkan kesadaran Pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan terhadap Tenaga kerja.

3.Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :

- a. Meningkatkan Profesionalisme dan mengoptimalkan kinerja Aparatur Pemerintah dan Pekerja serta peran Masyarakat dalam Pembangunan.
- b. Mengoptimalkan dan mensosialisasikan aturan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur teknis penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- c. Mengoptimalkan Perangkat Teknologi Informasi dan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan.

4. Strategi mengurangi Kelemahan untuk mencegah dan mengatasi Ancaman (WT) Adalah :

- a. Mengoptimalkan Pelatihan- pelatihan baik dalam Bidang Ketenagakerjaan maupun Ketransmigrasian kepada Masyarakat Kota Serang.
- b. Mengoptimalkan Pelatihan- Pelatihan dan Bimbingan Teknis terhadap Aparatur Pemerintah dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Proses yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merancang 6 Program, 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dan dengan pagu indikatif Rp. 9.832.356.994 ,- sedangkan hasil analisis kebutuhan yaitu 6 Program dan 20 Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 9.832.356.994 maka setelah kami bandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan besaran anggaran dan rumusan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yaitu untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan setelah dilaksanakan pemrosesan bahwa hasil analisis kebutuhan tidak ada perubahan masih tetap dengan 6 Program, 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 9.832.356.994

Penjelasan temuan – temuan setelah proses dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu tidak ada perbedaan baik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maupun besaran Pagu Indikatif.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Serang

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						9.832.356.994						9.832.356.994
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	70	967.500.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	70	967.500.000
1	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	822.500.000	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	822.500.000
(1)	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	60	822.500.000	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	60	822.500.000
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persentase LPK yang dibina	%	100	75.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		persentase LPK yang dibina	%	100	75.000.000
(2)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Serang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	lembaga	24	75.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Serang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	lembaga	24	75.000.000
3	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil		persentase perusahaan kecil yang telah dibina	%	100	-	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil		persentase perusahaan kecil yang telah dibina	%	100	-
(3)	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kota Serang	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kota Serang	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	-
4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan produktivitas pada perusahaan	%	100	70.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan produktivitas pada perusahaan	%	100	70.000.000
(4)	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Serang	Jumlah dokumen hasil pengukuran	Dokumen	1	70.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Serang	Jumlah dokumen hasil pengukuran	Dokumen	1	70.000.000
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	%	7,52	1.250.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	%	7,52	1.250.000.000
5	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		persentase peningkatan pelayanan antar kerja	%	6	739.196.707	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		persentase peningkatan pelayanan antar kerja	%	6	739.196.707
(5)	Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kota Serang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui	Orang	80	178.329.000	Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kota Serang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui	Orang	80	178.329.000
(6)	Pelayanan Antar Kerja	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	140	223.661.000	Pelayanan Antar Kerja	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	140	223.661.000
(7)	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Serang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	Orang	80	161.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Serang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	Orang	80	161.000.000
(8)	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	70	176.206.707	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	70	176.206.707

6	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai fungsi	%	100	78.136.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai fungsi	%	100	78.136.000
(9)	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Kota Serang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	50	78.136.000	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Kota Serang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	50	78.136.000
7	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		persentase dokumen informasi pasar kerja	%	100	272.367.500	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		persentase dokumen informasi pasar kerja	%	100	272.367.500
(10)	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online	Kota Serang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	36.490.500	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online	Kota Serang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	36.490.500
(11)	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Serang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	100	113.509.500	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Serang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	100	113.509.500
(12)	Jobfair/Bursa Kerja	Kota Serang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	600	122.367.500	Jobfair/Bursa Kerja	Kota Serang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	600	122.367.500
8	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota		Persentase PMI yang dilindungi	%	60	160.299.793	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota		Persentase PMI yang dilindungi	%	60	160.299.793
(13)	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)	Kota Serang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	50	160.299.793	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)	Kota Serang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	50	160.299.793
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	%	50	750.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	%	50	750.000.000
9	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	%	100	501.469.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	%	100	501.469.000
(14)	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Serang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	100	242.625.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Serang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	100	242.625.000
(15)	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kota Serang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	4	258.844.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kota Serang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	4	258.844.000
10	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota		Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	100	248.531.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota		Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	100	248.531.000
(16)	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kota Serang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	24	99.027.500	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kota Serang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	24	99.027.500

(17)	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kota Serang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	Perkara	24	104.890.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kota Serang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	Perkara	24	104.890.000
(18)	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Kota Serang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20	44.613.500	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Kota Serang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20	44.613.500
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%	30	362.500.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%	30	362.500.000
11	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	30	362.500.000	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	30	362.500.000
(19)	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	89.500.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	89.500.000
(20)	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Lokasi transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	5	165.000.000	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Lokasi transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	5	165.000.000
(21)	Penyuluhan transmigrasi	Lokasi transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	50	60.000.000	Penyuluhan transmigrasi	Lokasi transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	50	60.000.000
(22)	Pelatihan Transmigrasi	Kota Serang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK	5	48.000.000	Pelatihan Transmigrasi	Kota Serang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK	5	48.000.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Transmigran Yang Dibina	%	75	170.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Capaian Transmigran Yang Dibina	%	75	170.000.000
12	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian		Persentase Transmigran yang dibina	%	100	170.000.000	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian		Persentase Transmigran yang dibina	%	100	170.000.000
(23)	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Lokasi transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	15	170.000.000	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Lokasi transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	15	170.000.000
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	6.332.356.994	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	6.332.356.994
13	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	16	264.133.657	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	16	264.133.657
(24)	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	149.234.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	149.234.750
(25)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2.569.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2.569.000

(26)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	2.394.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	2.394.000
(27)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	2.368.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	2.368.000
(28)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	2.368.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	2.368.000
(29)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	5	75.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	5	75.500.000
(30)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	29.699.907	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	29.699.907
14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	2	4.915.856.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	2	4.915.856.994
(31)	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	Orang	28	4.832.356.994	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	Orang	28	4.832.356.994
(32)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.500.000
(33)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	2	82.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	2	82.000.000
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	Dok	1	58.724.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	Dok	1	58.724.500
(34)	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	58.724.500	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	58.724.500
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%	100	26.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%	100	26.000.000
(35)	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Serang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	6.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Serang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	6.000.000
(36)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34	20.000.000

17	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%	100	380.038.168	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%	100	380.038.168
(37)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kota Serang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.591.082	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kota Serang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.591.082
(38)	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	99.159.055	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	99.159.055
(39)	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kota Serang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	24.863.616	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kota Serang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	24.863.616
(40)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.900.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.900.000
(41)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.218.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.218.007
(42)	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Kota Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	19.581.408	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Kota Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	19.581.408
(43)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000
(44)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	139.125.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	139.125.000
(45)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	16.600.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	16.600.000
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	44.780.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	44.780.100
(46)	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit	Unit	1	27.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit	Unit	1	27.000.000
(47)	Pengadaan mebel	Kota Serang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	17.780.100	Pengadaan mebel	Kota Serang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	17.780.100
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	205.675.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	205.675.600
(48)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.040.000
(49)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	168.635.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	168.635.600

20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%		437.147.975	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%		437.147.975
(50)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	398.737.975	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	398.737.975
(51)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	55	2.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	55	2.500.000
(52)	Pemeliharaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	35.910.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	35.910.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1 Proses usulan Program/ Kegiatan usulan pemangku kepentingan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang memperoleh usulan pemangku kepentingan dari masyarakat Kota Serang yaitu usulan Pelatihan dan Keterampilan Tata Boga, Rias Pengantin, dan Menjahit hasil musrembang Kota Serang.

2.5.2 kesesuaian usulan tersebut di kaitkan dengan Isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD adalah usulan tersebut sesuai dengan Isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang telah menyusun Program dan Kegiatan Masyarakat diantaranya :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan:
 - a. Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
 - d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - d. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota
3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan :
 - a. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi denga kegiatan :
 - a. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

Adapun usulan hasil Musrembang dari Masyarakat Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Curug di kaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD keterkaitannya dengan:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Program dan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.

TABEL. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
DISNAKERTRANS KOTA SERANG

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Kota Serang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n - pelatihan menjahit - pelatihan tataboga - pelatihan tata rias	79 org	

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” selaras dengan visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tahun 2019 sejalan dengan Visi Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya:

1. Perbaiki produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
2. Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasis hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
3. Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal;
4. Perbaiki regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha.

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu :

1. Peran Masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan Pemerintah Daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;

2. Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)
3. Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah, Masyarakat dan Daerah.

3.1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Dalam penyusunan suatu rencana Pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya.

Sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Peraturan Menakertrans Nomor 3 Tahun 2010 telah menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur unit kerja serta adanya perubahan kebijakan pembangunan ketransmigrasian dan berbagai dinamika lingkungan strategis, maka melalui Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012, Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut kemudian diubah. Di dalam dokumen Rencana Strategis tersebut dinyatakan bahwa sebagai bagian dari Pembangunan nasional, bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Upaya peningkatan daya saing bidang Ketenagakerjaan di arahkan untuk:

1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (*decent work*), dalam pengertian produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;

2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Peningkatan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Penyempurnaan peraturan-peraturan Ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan Ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
5. Pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
7. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Penyempurnaan kebijakan migrasi yang semakin besar di Provinsi Banten.
9. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya;
2. Pembangunan lahan tidur, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi untuk dijadikan industri berbasis masyarakat daerah.
3. Pembangunan Sinergisitas lintas Organisasi Perangkat Daerah dan Industri dalam mempublikasikan konsep transmigrasi lokal.
4. Mermusukan konsep pengembangan transmigrasi lokal sebagai daya tarik desa di kawasan transmigrasi dan menjadikan Ikon Daerah.
5. Membangun keterkaitan antara Karakteristik SDM, SDA dan Lingkungan dalam lingkup transmigrasi Lokal.
6. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal;
7. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi, maka ditetapkan Visi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 (lima) Tahun ke depan yaitu :

**“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT
TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, MANDIRI,
DAN SEJAHTERA”**

Upaya pencapaian Visi tersebut akan diimplementasikan melalui penjabaran Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri;
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. Meningkatkan perlindungan Ketenagakerjaan;
5. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi;
6. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi;
7. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan efektivitas pengawasan intern, dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISNAKERTRANS

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.

3.2.1. Tujuan : Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja

1. Meningkatkan Pelaksanaan Berbasis Unit Kompetensi
2. Meningkatkan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Melaksanakan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
4. Meningkatkan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
5. Meningkatkan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
6. Melaksanakan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
8. Melaksanakan Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota
9. Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
10. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota
11. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
12. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

3.2.2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja dan Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran

1. Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
2. Terselenggaranya Pembinaan Instruktur LPK dan Pengelola LPK yang Dibina
3. Terselenggaranya Konsultasi Perusahaan Kecil yang dibina
4. Terselenggaranya Bintek/ pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja
5. Terselenggaranya Bimtek Petugas Pelayanan Antar Kerja
6. Terselenggaranya Bimtek Calon tenaga kerja
7. Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan
8. Terselenggaranya Koordinasi dan pembinaan kepada LPTKS (BKK, P3MI, dan LPTKS lainnya)
9. Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Pasar kerja (IPK)
10. Terselenggaranya Job Fair
11. Terselenggaranya Workshop Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
12. Terfasilitasinya Bimtek persyaratan kerja (E-PP dan PKB)
13. Terselenggaranya Dokumen Monev pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan Data Sinergitas Ketenagakerjaan
14. Terselenggaranya bimtek Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Survei KHL
15. Terselenggaranya rapat persiapan penetapan UMK Kota Serang

16. Terlaksananya kegiatan Hari Buruh Internasional
17. Tersusunnya Dokumen Rekomendasi LKS Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial
18. Terselenggaranya Bimtek Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
19. Tersusunnya Dokumen Kesepakatan bersama LKS Tripartit, DEPEKO dan Gugus Tugas EEO dalam membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Serang dan meningkatnya SDM
20. Tersusunnya Dokumen Kerjasama Antar Daerah
21. Terselenggaranya Jumlah Lokasi Penempatan
22. Terselenggaranya sosialisasi/ seleksi tentang program transmigrasi regional
23. Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi
24. Terselenggaranya Transmigran yang dibina di lokasi penempatan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan adalah Pencapaian Visi - Misi Kepala Daerah. Pencapaian Visi - Misi dan Program Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 2023.

Visi Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 2023 adalah "TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA".

Misi Kepala Daerah Kota Serang :

1. Memperkuat peradaban yang berbasis nilai- nilai kemanusiaan.
2. Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pemberdayaan Masyarakat yang berdaya saing.
4. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang berkaitan dengan Misi

Kepala Daerah adalah Misi Nomor 3 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan Masyarakat yang berdaya saing, dengan Program dan Kegiatan adalah:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
 - d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan :
 - a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - d. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota
3. Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan :
 - a. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

Permasalahan :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Belum optimalnya Kualitas dan Produktivitas Pelatihan dan Keterampilan
3. Tingginya Angka Pengangguran

4. Rendahnya Penempatan Tenaga Kerja
5. Kurangnya Sosialisasi dalam Hubungan Industrial
6. Kurangnya Sosialisasi Ketransmigrasian
7. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat akan manfaat bertransmigrasi

Faktor Penghambat

1. Terbatasnya Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan
2. Belum tersedianya sarana transportasi yang dapat menjangkau Desa – desa

Faktor Pendorong

1. Adanya Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan
2. Banyaknya minat para Pencari Kerja untuk mengikuti Pelatihan dan Keterampilan
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup
4. Peraturan UU Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Hubungan Industrial
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

3.3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Antara Lain Meliputi:

1. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2023 yaitu Jumlah Program 6 (Enam), Kegiatan 20 (dua puluh) dan Sub Kegiatan 52 (lima puluh dua) yaitu:

a. Program

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial
- 5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

b. Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 8) Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota
- 9) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 10) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota
- 11) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 12) Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian
- 13) Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 14) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 15) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 16) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 17) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 18) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 19) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 20) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perintahan Daerah

c. Sub Kegiatan

- 1) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5) Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
- 6) Pelayanan Antar Kerja
- 7) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 8) Perluasan Kesempatan Kerja
- 9) Pengawasan dan pengendalian LPTKS
- 10) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online
- 11) Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online
- 12) Job fair/ Bursa Kerja
- 13) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)
- 14) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 15) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 16) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
- 17) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
- 18) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota
- 19) Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 20) Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota

- 21) Penyuluhan transmigrasi
- 22) Pelatihan Transmigrasi
- 23) Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman
- 24) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
- 25) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 26) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 27) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 28) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 29) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- 30) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 31) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 32) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 33) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 34) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 35) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
- 36) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 37) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor
- 38) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- 39) Penyediaan Peralatan rumah tangga
- 40) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 41) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 42) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
- 43) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 44) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 45) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 46) Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 47) Pengadaan mebel

- 48) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 49) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 50) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 51) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 52) Pemeliharaan Mebeleur

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok Masyarakat tertentu)

Sifat Penyebaran lokasi Program dan Kegiatan ada 4 (empat) lokasi yaitu:

a. Lokasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Umum :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan yaitu :

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Lokasi Program dan Kegiatan Pemerintah umum yaitu di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

b. Lokasi Program dan Kegiatan kelompok Masyarakat

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan yaitu

- a. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi
- b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- c. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
- d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan :

- a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- d. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota

Lokasi Program dan Kegiatan kelompok Masyarakat yaitu lokasinya di Wilayah Kota Serang (6 Kecamatan)

c. Lokasi Program dan Kegiatan Kawasan Industri/ Perusahaan

1) Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota

d. Lokasi Program dan Kegiatan Transmigrasi

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan yaitu
 - a. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan yaitu
 - a. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

Lokasi Program dan Kegiatan Kawasan Transmigrasi yaitu Lokasinya Wilayah kota Serang dan Lokasi Penempatan.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Yang di Rinci Menurut Sumber Pendanaannya

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif adalah sebesar Rp. 9.832.356.994 ,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Nama OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG

BIDANG URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		
																	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Tenaga Kerja										9.832.356.994				13.271.342.350	DISNAKERTRANS		
	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka					%		8,96			8,96		KEPALA DINAS		
		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya					%		100			100		KEPALA DINAS		
			Persentase Kesempatan Kerja					%		91,45			91,45				
			Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial					%		100			100				
				2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	70	967.500.000		70	2.989.351.000	Kabid Pelatihan Kerja dan Produktifitas		
				2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	822.500.000		100	2.159.351.000		
				2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	Kota Serang	60	822.500.000	APBD	275	2.159.351.000
				2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	Kota Serang			APBD		
				2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase LPK yang dibina	%		100	75.000.000		100	400.000.000	
				2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	lembaga	Kota Serang	24	75.000.000	APBD	25	400.000.000
				2	07	03	2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	persentase perusahaan kecil yang telah dibina	%		100	-		100	230.000.000	
				2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Kota Serang	0	-	APBD	30	230.000.000
				2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktivitas pada perusahaan	%		100	70.000.000		100	200.000.000	
				2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Dokumen	Kota Serang	1	70.000.000	APBD	1	200.000.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	%		7,52	1.250.000.000			7,52	1.849.047.500	KABID Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
				2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan antar kerja	%		6	739.196.707			6	1.268.244.207	
				2	07	04	2.01 01	Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Binkek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	Kota Serang	80	178.329.000	APBD		40	238.329.555	
				2	07	04	2.01 02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	Kota Serang	140	223.661.000	APBD		400	405.708.086	
				2	07	04	2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	Kota Serang	80	161.000.000	APBD		150	330.000.000	
				2	07	04	2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	Kota Serang	70	176.206.707	APBD		70	294.206.566	
				2	07	04	2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai fungsi	%		100	78.136.000			100	98.136.000	
				2	07	04	2.02 02	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	Kota Serang	50	78.136.000	APBD		40	98.136.000	
				2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase dokumen informasi pasar kerja	%		100	272.367.500			100	322.367.500	
				2	07	04	2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	Kota Serang	1	36.490.500	APBD		1	36.490.500	
				2	07	04	2.03 02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	Kota Serang	100	113.509.500	APBD		100	113.509.500	
				2	07	04	2.03 03	Jobfair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	Kota Serang	600	122.367.500	APBD		600	172.367.500	
				2	07	04	2.04	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	Persentase PMI yang dilindungi	%		60	160.299.793			60	160.299.793	
				2	07	04	2.04 01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	Kota Serang	50	160.299.793	APBD		50	160.299.793	

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	%		50	750.000.000		50	851.469.000	KABID Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
				2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	%		100	501.469.000		100	501.469.000		
				2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	Kota Serang	100	242.625.000	APBD	100	242.625.000	
				2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Kota Serang	4	258.844.000	APBD	4	258.844.000	
				2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%		100	248.531.000		100	350.000.000	
				2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	Kota Serang	24	99.027.500	APBD	24	150.000.000	
				2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	Perkara	Kota Serang	24	104.890.000	APBD	24	136.000.000	
				2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	Kota Serang	20	44.613.500	APBD	20	64.000.000	
									Tingkat Pengangguran Terbuka	%		8,96	532.500.000		8,55	532.500.000	KEPALA DINAS	
KETRANSMIGR ASIAN	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka						Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%		90,7	532.500.000		90,7	532.500.000	KEPALA DINAS	
		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%		30	362.500.000		30	362.500.000	Kabid Transmigrasi
				3	32	03	2.01		Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%		30	362.500.000		30	362.500.000	
				3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Kota Serang	1	89.500.000	APBD	1	89.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	Lokasi transmigrasi	5	165.000.000	APBD	5	165.000.000	
				3	32	03	2.01	05	Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	Lokasi transmigrasi	50	60.000.000	APBD	50	60.000.000	
				3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK	Kota Serang	5	48.000.000	APBD	5	48.000.000	
				3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Dibina	%		75	170.000.000		75	170.000.000	Kabid Transmigrasi
				3	32	04	2.01		Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang Dibina	%		100	170.000.000		100	170.000.000	
				3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	Lokasi transmigrasi	15	170.000.000	APBD	15	170.000.000	
KESEKERTARIATAN																		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah 60.24 - B							Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	Nilai		66,34			66,34		KEPALA DINAS
							01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan			100	6.332.356.994		100	7.048.974.850	Sekretaris Dinas
				2	07	01	2.01		Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok		16	264.133.657		16	360.199.000	
				2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Kota Serang	5	149.234.750	APBD	5	155.000.000	
				2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kota Serang	1	2.569.000	APBD	1	2.569.000	
				2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	Kota Serang	1	2.394.000	APBD	1	2.394.000	
				2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Kota Serang	1	2.368.000	APBD	1	2.368.000	
				2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Kota Serang	1	2.368.000	APBD	1	2.368.000	
				2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Kota Serang	5	75.500.000	APBD	2	75.500.000	
				2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Kota Serang	1	29.699.907	APBD	5	120.000.000	

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok		2	4.915.856.994			2	4.915.856.994	
				2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Kota Serang	28	4.832.356.994	APBD		36	4.832.356.994	
				2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kota Serang	1	1.500.000	APBD		1	1.500.000	
				2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kota Serang	2	82.000.000	APBD		1	82.000.000	
				2	07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	Dok		1	58.724.500			1	60.000.000	
				2	07	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	Kota Serang	1	58.724.500	APBD		1	60.000.000	
				2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%		100	26.000.000			100	142.890.000	
				2	07	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Paket	Kota Serang	6	6.000.000	APBD		3	91.000.000	
				2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kota Serang	34	20.000.000	APBD		36	51.890.000	
				2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%		100	380.038.168			100	747.770.781	
				2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Paket	Kota Serang	1	7.591.082	APBD		1	10.001.454	
				2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Paket	Kota Serang	1	99.159.055	APBD		1	255.044.615	
				2	07	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	paket	Kota Serang	1	24.863.616	APBD		1	49.999.712	
				2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Kota Serang	1	21.900.000	APBD		1	43.800.000	
				2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	Kota Serang	1	21.218.007	APBD		1	60.000.000	

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				2	07	01	2.06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kota Serang	1	19.581.408	APBD		1	48.000.000
				2	07	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Kota Serang	12	30.000.000	APBD		1	34.040.000
				2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kota Serang	12	139.125.000	APBD		1	223.885.000
				2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kota Serang	1	16.600.000	APBD		1	23.000.000
				2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	44.780.100			100	127.980.100
				2	07	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit	Unit	Kota Serang	1	27.000.000	APBD		2	81.000.000
				2	07	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Kota Serang	2	17.780.100	APBD		1	46.980.100
				2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	205.675.600			100	210.000.000
				2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Serang	12	37.040.000	APBD		1	37.040.000
				2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kota Serang	1	168.635.600	APBD		2	172.960.000
				2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%			437.147.975				484.277.975
				2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Serang	21	398.737.975	APBD		21	398.737.975
				2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Kota Serang	55	35.910.000	APBD		69	55.140.000
				2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Kota Serang	2	2.500.000	APBD		5	30.400.000

Perumusan dan Definisi Operasional Indikator Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				
OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang				
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/ Formula	Penjelasan/ Keterangan
KETENAGAKERJAAN				
Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	SURVEY BPS
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Yang Berdaya	%	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang Berusaha/ Mandiri}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}} \times 100\%$	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	$\frac{\text{Jumlah Peserta Yg Berkualitas \& Produktivitas Pasca Pelatihan}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}} \times 100\%$	
Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah yang mendaftar}} \times 100\%$	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah LPK yang Dibina}}{\text{Jumlah LPK}} \times 100\%$	
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang telah dibina	%	$\frac{\text{Jmlh Perusahaan Kecil yang dibina}}{\text{Jmlh Perusahaan Kecil}} \times 100\%$	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produktivitas Peserta	%	$\frac{\text{perusahaan yang meningkat produktivitas}}{\text{jumlah perusahaanyang mengikuti pelatihan/bimtek}} \times 100\%$	
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	SURVEY BPS
Program Penempatan Tenaga Kerja	Capaian Pencari Kerja yang telah ditempatkan	%	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$	Aplikasi Simpaker
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan antar kerja	%	$\frac{\text{Jumlah petugas Pelayanan Antar Kerja}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100\%$	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai fungsi	%	$\frac{\text{Jumlh LPTK yang melaksanakan fungsi}}{\text{Jumlah LPTK yang dibina}} \times 100\%$	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase dokumen informasi pasar kerja yang ditetapkan	%	$\frac{\text{Jumlh dokumen informasi pasar kerja yg tersedia}}{\text{Jumlah dokumen yg ditetapkan}} \times 100\%$	
Perlindungan PMI (pra dan Purna penempatan)di daerah	Persentase PMI yang dilindungi	%	$\frac{\text{Jumlah PMI yang ditempatkan}}{\text{Jumlah CPMI yang dibina}} \times 100\%$	

Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	$\frac{\text{Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja Yg Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja}} \times 100\%$	
Program Hubungan Industrial	Capaian Hubungan Industrial Yang Sesuai Aturan Ketenagakerjaan	%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Normatif Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan sesuai ketentuan	%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Yang Tersedia}}{\text{Jumlah dokumen yang ditetapkan}} \times 100\%$	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen}} \times 100\%$	
KETRANSMIGRASIAN				
Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	$\frac{\text{Jumlah Transmigran yang Bertahan}}{\text{Jumlah Transmigran yang Ditempatkan}} \times 100\%$	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%	$\frac{\text{Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Animo Calon Transmigran}} \times 100\%$	
Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	$\frac{\text{Jumlah Transmigran Yang Terseleksi}}{\text{Jumlah Animo Calon Transmigran}} \times 100\%$	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Capaian Transmigran Yang Dibina	%	$\frac{\text{Jumlah Transmigran Yang Dibina}}{\text{Jumlah Transmigran yang ditempatkan}} \times 100\%$	5 Tahun terakhir
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah Transmigran Yang Dibina Tahun N}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$	

KESEKRETARIATAN				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah 66,24 B	Angka	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	$\frac{\text{Jumlah Kepuasan pelayanan sekretariat}}{\text{Jumlah ASN Disnakertrans}} \times 100\%$	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	%	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$	
	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen}} \times 100\%$	
	Tingkat Kehadiran Aparatur	%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran ASN Disnakertrans}}{\text{Total ASN Disnakertrans}} \times 100\%$	
	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen}} \times 100\%$	
	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Dokumen Yang Harus Disampaikan}} \times 100\%$	
	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Dokumen}}{\text{Total Ketersediaan Dokumen}} \times 100\%$	
	Tingkat ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Dokumen Yang Harus Disampaikan}} \times 100\%$	
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	Jumlah Ketersediaan Dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah	dok	Jumlah Ketersediaan Dokumen Keuangan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat daerah	dok	Jumlah Ketersediaan Dokumen BMD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian}}{\text{Total Target}} \times 100\%$	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum}}{\text{Total Target}} \times 100\%$	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan BMD}}{\text{Total BMD}} \times 100\%$	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Jasa Penunjang}}{\text{Total Ketersediaan Jasa Penunjang}} \times 100\%$	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah BMD Yang Dipelihara}}{\text{Total BMD}} \times 100\%$	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH****4.1. RENCANA PERKIRAAN PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun Anggaran 2023 Nihil

Tabel. 4.1			
Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2023			
KODE	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TARGET PENGANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	NIHIL		

4.2. RENCANA PROGRAM UNGGULAN DAN MENDESAK

Tabel 4.2			
RUMUSAN RENCANA INDIKASI KEGIATAN / SUB KEGIATAN PADA PROGRAM MENDESAK			
TAHUN 2023			
Program Mendesak	Rencana Indikasi/ Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
Penataan Pedagang Kreatif Lapangan			
Terobosan Pengurangan Kemacetan dan peningkatan disiplin berlalu lintas			
Peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan air			
Penegakan perda K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) secara konsisten			
Pencegahan penyebaran dan penanganan dampak pandemi covid 19	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi (pelatihan keterampilan dan pelatihan berbasis kompetensi)	822.500.000	
	Jobfair/Bursa Kerja	122.367.500	

Tabel 4.2			
RUMUSAN RENCANA INDIKASI KEGIATAN / SUB KEGIATAN PADA PROGRAM UNGGULAN			
TAHUN 2023			
Program unggulan	Rencana Indikasi/ Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
Pembangunan alun-alun atau ruang publik di setiap kecamatan			
Pembangunan kampung tematik	NIHIL		
Pembangunan Mesjid Agung sebagai land mark Kota Serang			
Pengembangan Serang Smart City			
Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata			

4.3. USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA K/L DAN RENJA PD PROVINSI

Tabel 4.3						
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber Dana APBN atau APBD Provinsi						
pada Renja K/L dan Renja PD Pemprov Banten Tahun 2022						
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Instansi PJ (OPD Pemprov/Kementerian/ Lembaga)
	Indikator	Satuan	Target			

NIHIL

5.1 KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) Disnakertrans Kota Serang Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Disnakertrans Kota Serang untuk Periode 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Serang. Dimana RPJMD tersebut adalah merupakan Penjabaran Visi dan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2019 - 2023.

Maksud penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang ada, sedangkan Tujuan penyusunan Renja adalah untuk menjadi Pedoman Perencanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun depan (Tahun 2023) dengan mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang agar dapat menjalankan Visi dan Misi dari Pemerintah Kota Serang.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang di rencanakan 6 Program, 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif yang sudah di analisis kebutuhannya sebesar Rp. 9.832.356.994 ,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

- 5.2.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang berkewajiban untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- 5.2.2 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai Perencanaan Program/ Kegiatan yang akan di laksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disnakertrans Kota Serang.

- 5.2.3 Disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan Program/ Kegiatan yang di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 5.2.4 Pada akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing dan hasilnya dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota melalui Bappeda Kota Serang.

Serang,

2022

**Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Serang**



Dr. H. IKBAL, S.Pd, M.Kes
NIP. 19680304 199003 1 005